

**Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah  
Kabupaten Konawe Selatan**

*Analysis of Contribution of Regional Original Income to Regional Income  
of South Konawe Regency*

La Jejen\*

Politeknik Baubau, Baubau, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: 8 April 2022  
Revised: 12 April 2022  
Accepted: 13 Mei 2022

KEYWORD

Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Pendapatan Daerah.

*Contribution, Locally-Generated Revenue,  
Regional Income*

CORRESPONDING AUTHOR

Nama : La Jejen  
Address: Jln. DR. Wahidin No.67, Kota Baubau  
E-mail : lajejen@poltekbaubau.ac.id  
No. Tlp : 081248965645

A B S T R A C T

Penelitian ini berjudul analisis kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Konawe Selatan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis Kuantitatif yang bersifat deskriptif, di mana penelitian ini menggambarkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah diukur dengan menggunakan angka-angka perbandingan dengan membandingkan besaran angka yang di dapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan periode 2007-2017 adalah relatif rendah. Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti Pajak Daerah, Retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan periode 2007-2017 relatif masih rendah.

*This study is entitled the analysis of regional income to the regional income of South Konawe Regency. This study aims to study and analyze regional own-source revenue towards the regional income of South Konawe Regency. This research uses descriptive quantitative analysis, in which this study illustrates the regional finance to regional income using numbers by comparing the figures obtained. The results showed that the contribution of regional own-source revenue (PAD) to the Regional Revenue of South Konawe Regency in the period 2007-2017 was relatively low. Contribution of Local Own Revenue Components (PAD) such as Regional Tax, Regional Retribution, BUMD profit, and others. Regional original income to the Regional Revenue of South Konawe Regency in the period 2007-2017 is still relatively low.*

**PENDAHULUAN**

Otonomi daerah merupakan peluang dan juga tantangan bagi setiap daerah. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk berkreasi dalam meningkatkan kesejahteraan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap daerah. Disisi lain otonomi daerah juga merupakan tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dan juga dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan.

APBD disusun oleh pemerintah daerah dan anggota legislatif (DPRD). Salah satu tujuan dibuat anggaran adalah untuk membiayai seluruh belanja rutin pegawai dan kegiatan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya tahap pelaksanaan APBD adalah proses pelaksanaan pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten selama tahun anggaran berjalan. Setelah tahap pelaksanaan ini kemudian dilanjutkan dengan proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh walikota/bupati kepada DPRD kota/kabupaten untuk diberikan penilaian. Sebagai salah satu instansi pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan APBD.

Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi kekayaan sumber daya yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan kemandirian daerah. Mengingat hal tersebut, seharusnya dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui sumber-sumber pendapatan daerah itu sendiri. Adapun, perkembangan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Konawe Selatan selama tiga (3) tahun terakhir sebagai mana terlampir dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.** Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015-2017 (Dalam Rupiah)

PAD	2015	2016	2017
Pajak	3.979.000.000	11.179.000.000	8.032.000.000
Hasil Retribusi Daerah	8.350.000.000	10.319.000.000	2.277.000.000
Hasil pengelolaan kekayaan daerah	4.519.000.000	4.226.000.000	4.108.000.000
Lain-lain PAD yang sah	8.912.000.000	20.042.000.000	29.431.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>25.762.000.000</b>	<b>45.766.000.000</b>	<b>43.850.000.000</b>

Sumber : BPS Sulawesi Tenggara, 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas pendapatan asli daerah (PAD) yang dimaksud adalah pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Kemudian jika dilihat dari jumlah penerimaan PAD dari tiga tahun terakhir masing mengalami fluktuasi selama tahun 2015-2017. Jika dilihat dari masing-masing komponen PAD mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Hal ini bisa dilihat tingkat pajak pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.979.000.000, kemudian meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp. 11.179.000.000 dan pada tahun 2017 menurun sebesar 8.032.000.000. Kemudian jika dilihat Hasil retribusi daerah pada tahun 2015 sebesar 8.350.000.000 dan meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp. 10.319.000.000 namun mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.277.000.000. Selanjutnya Hasil pengelolaan kekayaan daerah pada tahun 2015 sebesar Rp 4.519.000.000 dan meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp. 4.226.000.000 namun menurun pada tahun 2017 sebesar Rp.

4.108.000.000. Kemudian lain-lain PAD yang sah pada tahun 2015 sebesar Rp. 8.912.000.000 dan meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp. 20.042.000.000. kemudian meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp 29.431.000.000.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan”.

### **Teori Desentralisasi Fiskal**

Menurut Sukirno (2003), kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Menurut Tambunan, kebijakan memiliki dua prioritas, yang pertama adalah mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Dan yang kedua adalah mengatasi stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain: pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran.

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan bagian penting dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab.

Dalam Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2007 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, keuangan daerah diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah, sebagaimana yang telah didefinisikan sebelumnya, mempunyai makna sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber pendapatan daerah diperoleh dari:

### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

### **2. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber dana yang berasal dari pos dana perimbangan terdiri dari: dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.

## **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Mardiasmo (2002:132), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Desentralisasi berarti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain pendapatan asli daerah.

## **Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah**

Menurut Brata (2004) yang dikutip oleh Adi dan Harianto (2007) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap ekonomi daerah yaitu PAD serta sumbangan dan bantuan. Menurut Pujiati, (2008), dengan adanya kewenangan daerah dalam mengoptimalkan PAD sehingga komposisi PAD sebagai penerimaan daerah juga meningkat.

Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat Tambunan (2006:36) bahwa pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu. Namun apabila eksploitasi PAD dilakukan secara berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002:87).

Menurut Mardiasmo (2011:12) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2011:15) mengemukakan bahwa Retribusi daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Konawe Selatan tepatnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Kabupaten Konawe Selatan. Ini dipilih karena sumber data dan informasi yang di butuhkan. Adapun waktu penelitian akan direncanakan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak proposal ini disetujui.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis Kuantitatif yang bersifat deskriptif, di mana penelitian ini menggambarkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah diukur dengan menggunakan angka-angka perbandingan dengan membandingkan besaran angka yang di dapatkan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data dari hasil dokumentasi yang terdiri dari: 1) Data Pendapatan Asli Daerah target maupun realisasi Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007-2017 ; 2) Data Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007-2017.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari: 1) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan; 2) Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Metode dokumentasi adalah proses untuk memperoleh data dengan jalan mengumpulkan, mencatat, dan merekam data-data yang dipublikasikan oleh lembaga atau instansi tertentu yang terkait dengan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan realistis. Dokumen yang digunakan berasal dari berbagai literature, buku, jurnal dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan penelitian.

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode berikut :

- Sortir, yaitu aktivitas memilah-milah data menurut tingkat kepentingannya.
- Coding, yaitu pemberian identitas data untuk memudahkan mengelompokkannya
- Editing, yaitu menyusun data menurut kepentingannya
- Tabulasi, yaitu pengelompokkan data ke dalam table
- Interprestasi, yaitu menjelaskan dan menguraikan data-data berdasarkan variabel yang di teliti dalam penelitian ini.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang telah dirumuskan maka metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif yaitu dimana data yang digunakan dalam penelitian berupa angka-angka. Adapun rumus yang digunakan untuk menjawab permasalahan ialah:

$$K = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

(Halim, Abdul 2001)

**Tabel 1.** Kriteria-Kriteria Kontribusi (dalam persentase)

Persentase	Kriteria
0,00 – 10	Sangat kurang
>10 – 20	Kurang
>20 – 30	Sedang
>30 – 40	Cukup baik
>40 – 50	Baik
Lebih dari 60	Sangat baik

Sumber: Halim, 2001

Pembahasan dalam penelitian ini agar lebih terarah, maka variabel-variabel yang di gunakan di operasikan sebagai berikut: 1) Pendapatan Daerah adalah penerimaan yang diperoleh baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2006-2015 dinyatakan dalam satuan rupiah; 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang

meliputi pajak, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007-2017 dinyatakan dengan satuan rupiah. Kontribusi adalah sumbangan dari penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah yang diukur dengan satuan persen (%).

## HASIL & PEMBAHASAN

Terkait dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu mengetahui bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan selama tahun 2007-2017 yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif.

**Tabel 2.** Perhitungan Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah  
Tabel Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2007-2017 (dalam rupiah)

No	Tahun	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi (%)
1	2007	689.600.000	5.435.929.000	12,69
2	2008	1.296.000.000	8.811.823.000	14,71
3	2009	723.784.000	20.6170.671.000	3,51
4	2010	566.179.000	9.102.593.000	6,22
5	2011	1.063.286.000	6.450.728.000	16,48
6	2012	990.112.000	11.441.751.000	8,65
7	2013	177.437.000	12.449.690.000	1,43
8	2014	305.219.000	18.035.020.000	1,69
9	2015	397.999.000	25.762.480.000	15,44
10	2016	1.117.915.000	4.576.689.000	24,42
11	2017	803.293.000	4.385.046.000	18,31

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, diolah, 2018

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah memiliki nilai persentase yang berbeda-beda dari tahun 2007 - 2017. Kontribusi terbesar pada tahun 2016 dengan nilai persentase sebesar 24,42 dan kontribusi yang paling rendah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2011 dengan nilai persentase sebesar 1,43 persen.

**Tabel 3.** Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2005-2015 (dalam rupiah)

No	Tahun	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi (%)
1	2007	2.910.800.000	5.435.929.000	53,55
2	2008	2.357.000.000	8.811.823.000	26,75
3	2009	3.086.048.000	20.6170.671.000	14,97
4	2010	3.651.205.000	9.102.593.000	40,11
5	2011	2.521.535.000	6.450.728.000	39,09
6	2012	3.414.400.000	11.441.751.000	29,84
7	2013	4.412.580.000	12.449.690.000	35,44

8	2014	4.604.820.000	18.035.020.000	25,53
9	2015	8.350.580.000	25.762.480.000	32,41
10	2016	1.031.939.000	4.576.689.000	2,25
11	2017	227.744.000	4.385.046.000	5,19

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, diolah, 2018

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah memiliki nilai persentase yang berbeda-beda. Kontribusi terbesar pada tahun 2007 dengan nilai persentase sebesar 53,55 persen dan kontribusi yang paling rendah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2016 dengan nilai persentase sebesar 2,25 persen.

**Tabel 4.** Kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2007-2017 (dalam rupiah)

No	Tahun	Laba BUMD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi (%)
1	2007	10.000.000	5.435.929.000	0,18
2	2008	1.311.823.000	8.811.823.000	14,89
3	2009	-	20.6170.671.000	-
4	2010	1.145.148.000	9.102.593.000	12,58
5	2011	709.962.000	6.450.728.000	11,01
6	2012	2.187.881.000	11.441.751.000	19,12
7	2013	2.035.130.000	12.449.690.000	16,35
8	2014	3.320.180.000	18.035.020.000	18,41
9	2015	4.519.770.000	25.762.480.000	17,54
10	2016	4.226.150.000	4.576.689.000	9,23
11	2017	410.847.000	4.385.046.000	9,36

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, diolah, 2018

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi laba BUMD terhadap pendapatan asli daerah memiliki nilai persentase yang berbeda-beda. Kontribusi terbesar pada tahun 2012 dengan nilai persentase sebesar 19,12 persen dan kontribusi yang paling rendah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2009 dengan nilai persentase sebesar 0 persen.

**Tabel 5.** Kontribusi Lain-lain PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2005-2015 (dalam rupiah)

No	Tahun	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi (%)
1	2007	2.910.800.000	5.435.929.000	53,55
2	2008	2.357.000.000	8.811.823.000	26,75
3	2009	3.086.048.000	20.6170.671.000	14,97
4	2010	3.651.205.000	9.102.593.000	40,11
5	2011	2.521.535.000	6.450.728.000	39,09
6	2012	3.414.400.000	11.441.751.000	29,84
7	2013	4.412.580.000	12.449.690.000	35,44
8	2014	4.604.820.000	18.035.020.000	25,53
9	2015	8.350.580.000	25.762.480.000	32,41
10	2016	1.031.939.000	4.576.689.000	2,25
11	2017	227.744.000	4.385.046.000	5,19

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, diolah, 2018

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah memiliki nilai persentase yang berbeda-beda. Kontribusi terbesar pada tahun 2017 dengan nilai persentase sebesar 67,11 persen dan kontribusi yang paling rendah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2009 dengan nilai persentase sebesar 8,15 persen.

**Tabel 6.** Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah (PAD) tahun 2007-2017 (dalam rupiah)

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Daerah	Kontribusi (%)
1	2007	5.435.929.000	154.362.192.000	3,52
2	2008	8.811.823.000	441.916.599.000	1,99
3	2009	20.6170.671.000	400.623.810.000	5,15
4	2010	9.102.593.000	434.784.477.000	2,09
5	2011	6.450.728.000	446.491.861.000	1,44
6	2012	11.441.751.000	4.941.999.990.000	2,32
7	2013	12.449.690.000	581.012.860.000	2,14
8	2014	18.035.020.000	665.029.240.000	2,71
9	2015	25.762.480.000	793.489.280.000	3,25
10	2016	4.576.689.000	865.566.860.000	5,29
11	2017	4.385.046.000	105.537.329.000	4,15

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, diolah, 2018

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah Kabupaten Konawe Selatan. Kontribusi terbesar pada tahun 2016 dengan nilai persentase sebesar 5,29 persen dan kontribusi yang paling rendah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2008 dengan nilai persentase sebesar 1,99 persen. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Konawe Selatan masih relatif rendah. Terlihat adanya fluktuasi kenaikan dan penurunan persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama periode 2007-2018.

Kontribusi dalam penelitian ini adalah besarnya jumlah iuran yang bersumber dari PAD dan komponennya, seperti: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang dipisahkan terhadap PAD itu sendiri dan terhadap Pendapatan Daerah yang dilihat dalam persentase setiap tahun anggaran. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan masih relatif rendah. Terlihat adanya fluktuasi kenaikan dan penurunan persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama periode 2007-2017.

Pada tahun 2007 kontribusi persentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah sebesar 3,52 persen, sementara tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 1,99 persen, tahun 2009 meningkat sebesar 5,15 persen, tahun 2010 menurun sebesar 2,09 persen, tahun 2011 sebesar 1,44 persen, tahun 2012 sebesar 2,32 persen, tahun 2013 sebesar 2,14 persen, tahun 2014 sebesar 2,71 persen, tahun 2015 sebesar 3,25 persen, tahun 2016 sebesar 5,29 persen dan tahun 2017 sebesar 4,15. Penyebab penurunan kontribusi dari tahun ke tahun adalah karena pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kurang fokus dalam meningkatkan penerimaan PAD secara keseluruhan.

Hal lain yang menyebabkan penurunan penerimaan PAD karena pemerintah Kabupaten Konawe Selatan mengharapkan bantuan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Jumlah PAD yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan tidak terlalu besar untuk dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan daerah secara keseluruhan. Kenyataan ini berarti berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:132), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian adalah: kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah relatif rendah. Artinya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan kurang fokus dalam meningkatkan penerimaan PAD dan masih mengharapkan bantuan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya melibatkan variabel lainnya misalnya dana perimbangan karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Adi, Priyo Hari dan Harianto David. 2007. *“Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapital”*.

Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.

Afdi Nizar, Muhamad. 2009. *Arah Kebijakan Fiscal Pemerintah Indonesia 2000-2009*. Universitas Indonesia.

Baihaqi, 2011. *Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu periode 2005-2008*. Universitas Bengkulu. *Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 3 (2011)* 246-266.

Brata, Atep Adya. 2004. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka*.

Budiarto, T. (2008). *Tugas Akhir Planetarium Tawangmangu (Penekanan Pada Citra Arsitektur Futuristik)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Darise, Nurlan, 2009:67. *Akuntansi Keuangan Daerah* (Akuntansi Sektor. Publik), PT Indeks, Jakarta

Debora, 2014 *“Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Memenuhi APBD Pada Pemerintah Kota Medan*. Universitas Hkbp Nommensen Medan. Skripsi

Gusti Ayu Sonia Wina Laksmidan Ni Luh Supadmi. 2014. *Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Daerah*. Universitas Udayana, Bali. Jurnal dipublikasikan.

Halim, Abdul 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP. YKPN

Halim, Abdul 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Hendripanggayuh. 2014 <http://hendripanggayuh.blogspot.co.id/2014/02/analisis-pendapatan-asli-daerah-pad-dan.html>. Diakses Agustus 2017.

Harianto, David dan Priyo Hari Adi, 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.

Jaka Sriyana. 2005. *Ketahanan Fiskal: Studi Kasus Malaysia dan Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 10. No. 2, hal: 123-132. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

- Kaho. 2007. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nopirin. 1987. *Ekonomi Moneter*. Buku Dua. Yogyakarta: BPFE.
- Nurmiati, 2016. *Evaluasi Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna*. Universitas Haluoleo. Skripsi
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah* Pasal 1 Ayat 5
- Resmi, Siti. 2009:2. *Perpajakan*. Buku 1. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta
- Sonny Yuwono, Dwi Cahyo Utomo, H Suheiry Zein, H. Azrafiany A.R, 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya*. Malang: Bayumedia. 69
- Sony Yuwono., Tengku Agus Indrajaya., Hariyandi, 2008, *Penganggaran Sektor Publik*, Malang: Bayumedia Publishing
- Subagyo, Hery, 2007. *Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta. PT Elex Media Komputondo
- Sonny Yuwono, Dwi Cahyo Utomo, H Suheiry Zein, H. Azrafiany A.R, 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya*. Malang: Bayumedia. 69
- Sony Yuwono., Tengku Agus Indrajaya., Hariyandi, 2008, *Penganggaran Sektor Publik*, Malang: Bayumedia Publishing
- Sukirno, Sadono, 2003, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tambunan, Tulus. 2006. *Iklm Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi*. Kadin-Indonesia-Jetro. Jakarta.
- Undang-Undang No.23 tahun 2014 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- Yanti, (2015) “*Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur*”. Universitas Jawa Timur. Jurnal.
- Yuwono, Sonny dkk. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang: Bayumedia Publishing